



2016

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA****B2**Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 30 Agustus 2016 No. 69

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)****BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : drg. H.OSCAR PRIMADI, M.Ph.
2. Jabatan : KEPALA BIRO - KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT - SEKRETARIAT JENDERAL
3. NHK : 86457
4. Alamat Kantor : Jl. HR. RASUNA SAID BLOK X-5 KAV. 4 - 9, JAKARTA SELATAN
5. Tanggal Pelaporan : 15 Februari 2012, 21 Maret 2016

Status Laporan

15 Februari 2012	21 Maret 2016
------------------	---------------

II. DATA HARTA**A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH DAN BANGUNAN)**

	Rp. 3.473.654.100	Rp. 2.743.654.100
1. Tanah seluas 350 m2 , di Kota PONTIANAK, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 1992	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000
2. Tanah & Bangunan seluas 390 m2 & 208 m2, di Kota JAKARTA TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2009	Rp. 1.885.654.100	Rp. 1.885.654.100

	15 Februari 2012	21 Maret 2016
3. Tanah & Bangunan seluas 263 m2 & 312,7 m2, di Kota PONTIANAK, yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN WARISAN , perolehan dari tahun 2000 sampai dengan 2003 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 430.000.000	Rp. 400.000.000
4. Tanah & Bangunan seluas 450 m2 & 200 m2, di Kota PONTIANAK, yang berasal dari HASIL SENDIRI , perolehan dari tahun 2005 sampai dengan 2006 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 1.150.000.000	Rp. 450.000.000

B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA	Rp. 224.000.000	Rp. 584.000.000
1. Mobil, merk TOYOTA YARIS, tahun pembuatan 2011, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011	Rp. 213.000.000	Rp. 213.000.000
2. Motor, merk HONDA SCOOPY, tahun pembuatan 2010, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2010	Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000
3. Mobil, merk HONDA CR-V, tahun pembuatan 2012, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2012 (Penambahan Data Baru)	----	Rp. 360.000.000
b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA	----	----
c. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 43.000.000	Rp. 215.000.000

	15 Februari 2012		21 Maret 2016	
1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, WARISAN DAN HIBAH, perolehan dari tahun 1990 sampai dengan 1994 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp.	3.000.000	Rp.	50.000.000
2. BATU MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, WARISAN DAN HIBAH, perolehan tahun --- (Penambahan Data Baru)		----	Rp.	100.000.000
3. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1990 sampai dengan 2008 (Penambahan Data karena Pemecahan, Penghapusan Data Karena Pemecahan)	Rp.	40.000.000	Rp.	65.000.000
C. SURAT BERHARGA	Rp.	0	Rp.	136.386.994
1. Tahun investasi 2010, yang berasal dari HASIL SENDIRI (Penambahan Data Baru)		----	Rp.	136.386.994
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA	Rp.	798.306.100	Rp.	1.308.431.517
			USD	12.000
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Penambahan Data Harta Kekayaan, Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp.	798.306.100	Rp.	1.308.431.517
			USD	12.000
E. PIUTANG	Rp.	0	Rp.	0
TOTAL HARTA (II)	Rp.	4.538.960.200	Rp.	4.987.472.611
			USD	12.000
III. HUTANG		----		----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)	Rp.	4.538.960.200	Rp.	4.987.472.611
			USD	12.000



Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis